

Analisis Persepsi dan Preferensi Masyarakat Disabilitas terhadap Kebijakan dan Fasilitas Disabilitas di Kota Pekanbaru Riau

Jeni Wardi¹, Anto Ariyanto², Latifa Siswati³, David Setiawan⁴, Guntoro⁵, Lisnawita^{*6}, Olivia Anggie Johar⁷, Widya Apriani⁸, Nurhamin⁹, Fenty Widya¹⁰, Ririn Sari Wati¹¹, Rizky Octa Putri Charin¹², Budia Misri¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Lancang Kuning, ^{9,10,11,12,13}Yayasan Ibnu

*e-mail: jeniwardi@unilak.ac.id, guntoro@unilak.ac.id, lisnawita@unilak.ac.id, oliviaanggiejohar@unilak.ac.id, widyaapriani@unilak.ac, idinsanbergunanusantara.riau20@gmail.com

Abstract

The low accessibility of handling and services for persons with disabilities in Pekanbaru City, Riau Province, will certainly be an obstacle to the fulfillment and protection of rights for persons with disabilities. These barriers will have an impact on the development and rights of life for these marginalized people. Therefore, it is necessary to conduct an assessment to map the general situation and optimize the fulfillment of the rights of persons with disabilities. In this case, the researcher appointed Pekanbaru City as the focus of research. The stages of the research method are literature study, interviews, field observations, focus group discussions and data analysis. The results of this study will be used as a basis for developing policies that are inclusive of persons with disabilities so that they have equal opportunities before the State to enjoy social, economic, political, civil and cultural rights. The purpose of the study was to analyze the perception of the disabled community towards disability policies and facilities in the city of Pekanbaru and to analyze the preferences of the disabled community towards policies and facilities. The results show that the highest need for Infrastructure is 93%. In the Health sector, Hospital Needs with a percentage of 95.4%, Business Capital Requirements really help the economy of families with disabilities, namely the largest response of 94.70%, the Education Sector for special knowledge needs for disabilities the largest 84.3%, and the religious field needs lecturers and preachers disability-friendly 78.9%.

Keywords: *Perceptions and Preferences, Perception, Disabilities*

Abstrak

Rendahnya aksesibilitas penanganan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tentu akan menjadi hambatan bagi pemenuhan dan perlindungan hak bagi kaum disabilitas. Hambatan ini akan berdampak pada perkembangan dan hak hidup bagi kaum termarginalkan ini. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian untuk memetakan situasi umum serta optimalisasi pemenuhan hak para penyandang disabilitas yang dalam hal ini, peneliti mengangkat Kota Pekanbaru sebagai fokus penelitian. Tahapan metode penelitian adalah studi pustaka, wawancara, observasi lapangan, focus group discussion dan analisis data. Adapun hasil dari kajian ini akan digunakan sebagai landasan pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama di depan Negara untuk menikmati hak-hak sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas disabilitas di kota Pekanbaru dan untuk menganalisis preferensi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas. Hasil menunjukkan kebutuhan tertinggi bidang Infrastruktur sebesar 93%. Pada bidang Kesehatan dalam Kebutuhan Rumah sakit dengan persentase 95,4%, Kebutuhan Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%, Bidang Pendidikan untuk kebutuhan pengetahuan khusus disabilitas terbesar 84,3%, dan bidang keagamaan kebutuhan penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas sebesar 78,9%.

Kata kunci: *Persepsi dan Preferensi, Persepsi, Disabilitas*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai kondisi dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok marginal di Indonesia, yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Menurut WHO, secara harfiah, disabilitas berarti adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan, baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Dalam Konvensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/61/106 telah menyatakan bahwa “disabilitas” adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil

dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya.

Selama dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang stabil dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih terbilang sangat tinggi dan ketimpangan sosial masih juga sangat tinggi, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi dan rentan, termasuk dalam kategori ini adalah para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan dasar penunjang kehidupan lainnya.

Menurut data Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Indonesia tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia adalah sebanyak 211.926 orang, sebesar 3.873 penyandang tersebar di Provinsi Riau. Namun data sebaran penyandang disabilitas di 12 kab/kota yang ada di Provinsi Riau belum diketahui kejelasannya secara terperinci. Berikut peneliti sajikan di dalam tabel 1 terkait sebaran data penyandang disabilitas di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau tahun 2020 yang bersumber dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.

Tabel 1. Sebaran data penyandang disabilitas di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau tahun 2020

No	Kota/Kabupaten	Sumber Data	Jenis Disabilitas										Jumlah
			Daksa	Netra	Rungu	Mental	Ganda	Wicara	Grahitia	Intelektual (Down Sindrom)	Penyakit Berat	Eks Kusta	
1	Pekanbaru	PPDI Pekanbaru TH 2020	207	78	162	14	6	1	219	-	-	-	687
2	Siak	PPDI Siak TH 2020	313	96	76	243	330	61	0	-	-	-	1119
3	Kampar	PPDI Kampar TH 2021	830	335	294	661	748	196	0	-	-	-	3064
4	Rohil	PPDI Rohil TH 2022	298	38	77	115	65	18	19	24	23	10	687
5	Pelalawan	DPO PPDI TH 2020	310	47	64	134	0	34	15	-	-	-	604

Pada table diatas terdapat perbedaan pengelompokan jenis disabilitas diantara ke 5 kab/kota tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengumpulan data rinci dan penyamaan persepsi dalam pengelompokan data jenis disabilitas di Provinsi Riau khususnya telah menjadi problematika tersendiri.

Data jumlah penyandang disabilitas ini diperkirakan belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Menurut WHO, jumlah penyandang disabilitas tiap negara rata-rata mencapai 10 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini diperkirakan jauh lebih besar jika berdasarkan pada asumsi WHO tersebut, didukung dengan kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelit kemiskinan, sementara pelayanan kesehatan dan kesejahteraan lain dari pemerintah masih memprihatinkan dan belum merata.

Secara formal, Indonesia sudah memiliki sangat banyak peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, seperti UUD tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 6 dan Pasal 28 J. UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Perda Daerah Riau Nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan

disabilitas dan Pergub Riau Nomor 106 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi: “Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara dan mewujudkan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, terdapat Hak- hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu: Hak untuk hidup, Hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan social, hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik.” Tuntutan pemenuhan hak itu juga merupakan mandat dari beberapa instrumen hukum yang telah berlaku di Indonesia seperti UU No. 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa penyedia layanan publik harus bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 menegaskan bahwa penyedia pelayanan publik harus memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Demikian juga contoh lainnya adalah pada UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini menegaskan bahwa fasilitas publik harus dapat diakses oleh para penyandang disabilitas, seperti pintu masuk dan keluar, ruang penghubung horizontal, hubungan vertikal dalam gedung, transportasi vertikal, serta akses informasi.

Dengan adanya payung hukum tersebut, ternyata masih belum bisa menjamin terpenuhinya hak-hak para penyandang disabilitas yang ada, khususnya di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Hal ini dapat terlihat bahwa belum terpenuhinya beberapa hak para penyandang disabilitas di Pekanbaru khususnya di bidang aksesibilitas dan hak pelayanan publik, seperti tempat peribadatan, sekolah, pasar, bank, objek wisata dan pemakaman umum yang belum menyediakan akses tuna netra dan tuna daksa.

Kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru juga sangat terlihat pada masih banyak ditemuinya hambatan procedural serta arsitektural pada bus dan halte Trans Metro Pekanbaru. Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram. Selain itu belum adanya daftar trayek yang dilengkapi huruf braille juga menyulitkan penyandang tuna netra untuk bisa menikmati transportasi umum ini. Minimnya jalur khusus untuk pengguna kursi roda juga merupakan salah satu hambatan yang membuat para penyandang disabilitas khususnya tuna grahita menjadi kesulitan untuk menjangkau tempat-tempat umum seperti rumah sakit dan pusat perbelanjaan.

Rendahnya aksesibilitas penanganan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, tentu akan menjadi hambatan bagi pemenuhan dan perlindungan hak bagi kaum disabilitas. Hambatan ini akan berdampak pada perkembangan dan hak hidup bagi kaum termarginalkan ini. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian untuk memetakan situasi umum serta optimalisasi pemenuhan hak para penyandang disabilitas yang dalam hal ini, peneliti mengangkat Kota Pekanbaru sebagai lokus penelitian. Hasil dari kajian ini akan digunakan sebagai landasan pengembangan kebijakan yang bersifat inklusif bagi penyandang disabilitas sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama di depan Negara untuk menikmati hak-hak sosial, ekonomi, politik, sipil dan budaya

Penelitian tentang penyandang disabilitas telah banyak dibahas. Marvandito (2018) mengkaji layanan transportasi umum yang mudah diakses penyandang disabilitas dari perspektif hak asasi manusia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji isi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 105-108 UU tersebut memuat pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini berfokus pada bentuk pelayanan transportasi umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Tidak semua moda

transportasi cocok untuk penyandang tunarungu dan tunanetra. Pelayanan publik masih belum merata, terutama bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau kruk. Pelayanan angkutan umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas merupakan rangkaian intervensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan angkutan umum. Sedangkan formulir pelayanan angkutan umum meliputi informasi dan petunjuk memperoleh pelayanan, informasi ketersediaan tempat, dan informasi ketersediaan pegawai. Jenis dan bentuk pelayanan publik khususnya di bidang transportasi yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas yaitu jenis angkutan darat, jenis angkutan udara dan jenis angkutan kereta api.

Hastuti et. Al. (2018), mengeksplorasi upaya untuk mencapai pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2011 dan mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Namun, hingga saat ini, kelompok penyandang disabilitas masih terpinggirkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hasil survei menunjukkan bahwa setelah tiga tahun, Indonesia gagal melaksanakan pembangunan yang mengikutsertakan penyandang disabilitas. Dengan menggunakan model ekologi sosial, hambatan ditemukan di berbagai tingkatan, dari individu hingga masyarakat, termasuk lembaga formal dan informal. Upaya percepatan pelaksanaan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia harus dimulai dengan penyusunan masterplan pembangunan inklusif yang dilanjutkan dengan upaya besar-besaran untuk mengakhiri stigma terhadap penyandang disabilitas dan pembentukan Komisi Nasional Rakyat. dengan kemampuan terbatas. Penyandang Disabilitas (KND) yang akan bertindak sebagai pengamat. pada masalah disabilitas.

Tamba Jeffrey (2016) mempelajari aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Universiti Brawijaya. Universiti Brawijaya sebagai institusi pendidikan tinggi inklusif mendorong banyak perubahan infrastruktur aksesibilitas yang sesuai bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas (ambulans dan fasilitas aksesibilitas di Universiti Brawijaya bagi penyandang disabilitas. Fokus pada fasilitas pejalan kaki, pintu, elevator, ramp dan toilet di Universiti Brawijaya adalah beberapa titik di gedung fakultas dan administrasi.

Selain itu, Mutia Rahmi et. Al. (2018) dalam studi mereka tentang penggunaan asuransi kesehatan khusus untuk penyandang cacat. Kedudukan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan menghadapi banyak pelanggaran hak, salah satunya adalah hak untuk mengakses layanan kesehatan dan sosial. Karena aktivitas sehari-hari mereka terbatas karena disabilitas, termasuk mendapatkan pekerjaan, pendapatan yang mereka terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga terbatas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan jaminan kesehatan dari negara untuk menutupi biaya pengobatan dan pengobatan yang mereka butuhkan.

Hidayatullah (2018) mengeksplorasi harapan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas terus mengalami diskriminasi. Hal ini terlihat antara lain dalam memperoleh hak atas pendidikan, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pekerjaan, akses terhadap mobilitas fisik dan sosial, rekreasi, serta kesetaraan dalam hukum dan politik. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan instansi terkait tentang perlunya perlindungan sosial keluarga dalam rangka mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dengan meningkatkan atau memperkuat peran orang tua dalam membuka ruang harapan dan kesejahteraan dalam pengasuhan, rehabilitasi, kebutuhan, potensi dan kebutuhan, serta keluarga penyandang disabilitas.

Tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas disabilitas di kota Pekanbaru dan untuk menganalisis preferensi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas

2. METODE

Penelitian ini mengenai analisis persepsi dan preferensi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas disabilitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuisioner yang telah disiapkan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder adalah data penunjang yang digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Analisis data secara kuantitatif persepsi masyarakat disabilitas terhadap kebijakan dan fasilitas pada masyarakat disabilitas dilakukan dengan cara menghitung rata-rata jawaban responden pada skala Likert. Tingkat persepsi dari setiap unsur lalu dideskripsikan sesuai dengan fakta di lapangan maupun wawancara kepada responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang terdiri dari penyandang disabilitas rungu, daksa, netra dan wicara tersebar di 13 kecamatan dengan rincian yaitu penyandang disabilitas rungu tersebar di 9 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di kota pekanbaru (kecamatan Bukit raya, Tenayan Raya, Rumbai Timur, Payung sekaki, Sukajadi, Senapelan, Sail, Pekanbaru kota dan tuah madani).

3.1 Jenis Disabilitas Berdasarkan Kecamatan

Responden Penyandang disabilitas terbanyak berada dikecamatan tenayan raya dengan jumlah 13 orang (7 orang tuna rungu, 4 orang tuna daksa, 1 orang tuna netra dan 1 orang tuna wicara). Penulis berkesimpulan bahwa sebaran responden yaitu penyandang disabilitas yang ada di kota pekanbaru melebihi dari 80% kecamatan yang ada dikota pekanbaru dapat mewakili penyandang disabilitas rungu, daksa, netra dan wicara yang ada di kota Pekanbaru.

3.2 Jenis Disabilitas berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dari kalangan penyandang disabilitas daksa adalah yang paling banyak, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Sedangkan responden penyandang disabilitas yang paling sedikit yaitu wicara, yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, namun secara umum sebaran penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin hampir berimbang meskipun lebih banyak jenis kelamin laki-laki daripada perempuan.

3.3 Jenis Disabilitas berdasarkan Umur

Responden yang paling banyak adalah umur 31-40 tahun yaitu dengan jenis disabilitas daksa dengan jumlah 9 orang dan masih termasuk kategori umur produktif. Namun secara umum, keterwakilan dari semua jenis umur telah ada kecuali untuk penyandang disabilitas rungu, daksa dan netra yang diatas 51 tahun.

3.4 Jenis Disabilitas berdasarkan Pekerjaan

Responden memiliki kesempatan untuk peluang bekerja paling banyak diperoleh oleh penyandang disabilitas rungu dan daksa, namun responden umumnya bekerja lain-lain lebih banyak dan diikuti oleh ibu rumah tangga dan sebagai ASN/Honorar.

3.5 Jenis Disabilitas berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan responden yang paling banyak adalah tamatan SLTA yaitu berjumlah 23 orang dengan pendidikan paling tinggi di jenjang S2 sebanyak 2 orang disusul S1

sebanyak 3 Orang, namun secara umum penyandang disabilitas berpendidikan SLTA dan masih banyak yang berpendidikan SD dan SLTP.

3.6 Analisis Data Secara Umum

3.6.1 Infrastruktur

Responden sebagian besar merasa bahwa infrastruktur di kota pekanbaru sudah sesuai dengan kebutuhan terutama bagi penyandang disabilitas runtu, daksa dan wicara, sedangkan penyandang disabilitas netra merasa bahwa infrastruktur di kota pekanbaru belum sesuai dengan kebutuhan mereka.

1. Ketersediaan Fasilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas

Dinyatakan bahwa 100% responden dari semua jenis disabilitas baik runtu, daksa, netra dan wicara sepakat bahwa penyandang disabilitas memerlukan angkutan umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

2. Fasilitas Pelayanan Publik ramah disabilitas

Terdapat 81,67 % responden sangat berharap / memerlukan adanya fasilitas pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan 10% nya merasa belum membutuhkan fasilitas pelayanan publik untuk dirinya. Hal ini boleh jadi karena adanya bantuan dari orang-orang sekitar dalam akses tersebut. Berdasarkan pengamatan, terdapat keterbatasan fasilitas untuk penyandang disabilitas pada angkutan umum. Sebagian kecil mereka mulai beralih menggunakan kendaraan pribadi. Pelayanan yang buruk dan diskriminatif juga menjadi faktor penting bagi penyandang disabilitas.

3. Kebutuhan Sekolah dan Kampus yang ramah disabilitas

Menunjukkan bahwa hampir semua jenis penyandang disabilitas masih membutuhkan sekolah dan kampus yang ramah terhadap penyandang disabilitas meskipun masih ada 7,7 % yang berasal dari penyandang disabilitas netra dan 16,7 % dari jenis penyandang disabilitas wicara yang sudah mendapatkan sekolah ataupun kampus yang ramah terhadap disabilitas.

4. Ketersediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas

Harapan responden, penyandang disabilitas diberikan layanan khusus penyandang disabilitas terutama pada jalan, taman bermain dan sebagainya, hal ini terlihat dari tingginya responden memilih setuju dan sangat setuju untuk itu.

5. Ketersediaan Fasilitas Olahraga

Hanya 45% responden membutuhkan fasilitas olahraga dan tempat bermain di kota pekanbaru khusus untuk disabilitas. Untuk selebihnya masih merasa ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya olahraga belum di pahami oleh disabilitas, padahal olahraga untuk penyandang disabilitas dapat memberikan peningkatan kesejahteraan fisik dan mental, serta peningkatan kemandirian, tujuan, dan interaksi sosial.

6. Keterlibatan Disabilitas dalam perencanaan pembangunan

Mengenai pembangunan infrastruktur menunjukkan 63,33% responden ingin penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di kota pekanbaru. Namun dalam pelaksanaannya hanya penyandang disabilitas daksa dan netra yang telah mulai dilibatkan dengan persentase keterlibatan penyandang disabilitas daksa sebanyak 27,3 % dan penyandang disabilitas netra 15,4 %,

3.6.2 Kesehatan

1. Prioritas pelayanan vaksinasi terhadap disabilitas

Sebesar 73,33% responden sudah mendapatkan pelayanan prioritas vaksinasi COVID 19 bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil kuesioner sebagian lainnya berharap juga mendapatkan pelayanan terbaik untuk vaksinasi COVID 19.

2. Rumah sakit khusus disabilitas

Saat ini rumah sakit khusus bagi penyandang disabilitas di kota pekanbaru sangat diperlukan. Hal ini terlihat dari harapan seluruh responden. meskipun diketahui bahwa beberapa rumah sakit telah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas namun belum secara khusus bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

3. Perawat bersertifikat dan terapis khusus disabilitas

Begitu juga dengan perawat di rumah sakit, seluruh responden berharap adanya perawat bersertifikat dan terapis khusus disabilitas yang sangat membantu dalam layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

4. Ruang Pelayanan Khusus Disabilitas di Rumah Sakit Pemerintah

Selain perawat, pelayanan rumah sakit khususnya milik pemerintah, seharusnya terdapat ruang pelayanan khusus disabilitas. Hal ini terlihat dari tingginya pilihan setuju dan sangat setuju dari responden terhadap ruang khusus disabilitas di rumah sakit pemerintah.

5. Kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan

Begitu juga dengan kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan bagi penyandang disabilitas, seluruh responden sangat berharap karena sangat dibutuhkan penyandang disabilitas.

3.6.3 Ekonomi

1. Bantuan Sosial selama pandemic COVID 19

Sebanyak 66,67% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan bahwa belum mendapatkan bantuan sosial selama pandemi COVID 19, dan hanya sekitar 16,7% yang telah mendapatkan bantuan tersebut.

2. Permodalan usaha

Terdapat 83,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dengan adanya Permodalan usaha karena sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas saat ini.

3. Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta

Sebanyak 66,7% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa belum pernah ada pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta.

4. Usaha Online

Terdapat 88,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa sangat diperlukan usaha online mendorong peningkatan pendapatan keluarga saat ini. Sedangkan jenis disabilitas daksa sangat membutuhkan Usaha online yang mendorong peningkatan pendapatan keluarga dibandingkan dengan jenis disabilitas rungu netra dan wicara.

5. Pemodaln Usaha dari Pemerintah

Terdapat 83,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa Pemerintah sebaiknya memberikan permodalan usaha. Penyandang disabilitas daksa dan netra sangat berharap mendapatkan permodalan usaha dari pemerintah, begitu juga rungu dan wicara. Hanya saja beberapa dari mereka telah mendapatkan bantuan permodalan usaha dari pemerintah.

6. Keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas dari pihak Bank

Sebanyak 33,3% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa diharapkan pihak perbankan memberikan keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas meminjam dana di bank. Namun sekitar 66,7 % menyatakan tidak setuju. Penyandang disabilitas daksa dan netra kurang setuju mendapatkan keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas meminjam dana di bank.

7. Tenaga profesional keuangan yang melakukan pendampingan usaha

Terdapat 88,3 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa tenaga profesional keuangan yang melakukan pendampingan usaha. sehingga tidak terjadi gagal pengembalian modal.

3.6.4 Pendidikan

1. Pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas

Dalam bidang Pendidikan terdapat poin penting peninjauan yaitu pengetahuan Setiap keluarga akan perlunya pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas. Sebanyak 66,6% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa setiap keluarga perlu pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas. Penyandang disabilitas daksa dan netra sangat berharap pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas. Pengetahuan ini meliputi bagaimana merawat, melatih kemandirian, dan sebagainya.

2. Adanya sertifikasi setiap guru tentang pengetahuan disabilitas dalam sistem pengajarannya di sekolah umum

Terdapat 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju dengan adanya sertifikasi setiap guru tentang pengetahuan disabilitas dalam sistem pengajarannya di sekolah umum.

3. Adanya Regulasi Khusus dalam Perlindungan Kaum Disabilitas

Sebanyak 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju dengan adanya regulasi khusus dalam perlindungan kaum disabilitas untuk menghindari diskriminasi, di setiap sekolah dan kampus.

4. Penyediaan Fasilitas pengajaran sekolah dan kampus seharusnya menyediakan sistem pengajaran khusus untuk setiap jenis disabilitas

Sebesar 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju dengan adanya Penyediaan Fasilitas pengajaran sekolah dan kampus seharusnya menyediakan sistem pengajaran khusus untuk setiap jenis disabilitas.

5. Kesetaraan kaum disabilitas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa suatu daerah dan negara telah memiliki peradaban dan kepedulian sosial yang tinggi

Sebanyak 100% responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju dengan adanya Kesetaraan kaum disabilitas. Hal ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa suatu daerah dan negara telah memiliki peradaban dan kepedulian sosial yang tinggi.

3.6.5 Agama

1. Kegiatan keagamaan diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas

Dalam bidang Agama yang dikaji adalah respons terhadap adanya kegiatan keagamaan yang diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas. Sebanyak 50 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju bahwa disabilitas membutuhkan kegiatan keagamaan yang diperkuat oleh penceramah dan pendakwah. Kegiatan agama ini dapat berupa

ceramah dan diskusi serta pesantren khusus pada waktu waktu tertentu untuk disabilitas. Dapat diadakan di rumah ibadah sekitar tempat tinggalnya dan di tempat tinggal masing masing penyandang disabilitas.

2. Identifikasi bagi disabilitas apakah sudah mendapatkan pengasuh agama khusus dalam memberikan kajian tata ibadah yang benar sesuai ajaran agama dan negara

Sebesar 61,8 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju dengan identifikasi bagi disabilitas apakah sudah mendapatkan pengasuh agama khusus dalam memberikan kajian tata ibadah yang benar sesuai ajaran agama dan negara.

3. Kepercayaan bahwa negara telah memberikan pelayanan terbaik bagi disabilitas

Sebanyak 14 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju dengan percaya bahwa negara telah memberikan pelayanan terbaik bagi disabilitas.

4. Negara perlu membuat kebijakan khusus untuk disabilitas

Terdapat 100 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa negara perlu membuat kebijakan khusus untuk disabilitas.

5. Pembekalan terkait ideologi negara diperlukan oleh kaum disabilitas

Sebanyak 95.3 % responden dari semua jenis disabilitas menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa Pembekalan terkait ideologi negara diperlukan oleh kaum disabilitas.

Sekitar 1.6 % jenis disabilitas rungu masih ragu untuk mendapatkan pembekalan terkait ideologi negara, sedangkan 98.4 % jenis disabilitas daksa, netra, dan wicara mengatakan perlu mendapatkan pembekalan terkait ideologi negara

3.7 Analisis Data Berdasarkan Penyandang Disabilitas

3.7.1 Tuna Rungu

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama yaitu fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar total 89,5%. Dan kebutuhan kedua tertinggi adalah fasilitas angkutan umum ramah disabilitas sebesar total 84,2%. Kebutuhan ketiga yaitu jalan, taman bermain khusus disabilitas sebesar 78,9%. Pada bidang Kesehatan hasil analisis persepsi menyatakan 79 % responden merasa bahwa dalam pelayanan vaksinasi COVID19 saat ini telah diprioritaskan bagi penyandang disabilitas rungu. Respons terhadap Kebutuhan dengan total 73,7 % menyatakan membutuhkan rumah sakit khusus disabilitas di Kota Pekanbaru. Peringkat ketiga penyandang disabilitas menyatakan membutuhkan kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan disabilitas sebesar total 73,7 %. Kemudian di bidang Ekonomi kebutuhan terbesar adalah Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%. Peringkat kedua yaitu kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha sebesar total 84,2%. Peringkat ketiga sebesar 78,9 % adalah kebutuhan akan pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta dalam menjalankan usaha. Pada bidang Pendidikan, hasil analisis persepsi menunjukkan sebesar 84,3 % membutuhkan pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas. Selanjutnya pada bidang keagamaan hasil analisis persepsi menunjukkan sebesar 78,9% menyatakan perlunya kegiatan yang diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas

3.7.2 Tuna Daksa

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama yaitu fasilitas angkutan umum ramah disabilitas total 100 %. Kebutuhan kedua tertinggi sekolah dan kampus yang ramah disabilitas total 90,9 %. Kebutuhan ketiga yaitu fasilitas

pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar 78,9%. Pada bidang kesehatan hasil analisis persepsi menyatakan 63,2 % responden merasa bahwa dalam pelayanan vaksinasi COVID19 saat ini telah diprioritaskan bagi penyandang disabilitas rungu. Respons terhadap Kebutuhan Rumah sakit khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan total 95,4 % responden. Peringkat kedua penyandang disabilitas menyatakan membutuhkan pelayanan rumah sakit milik pemerintah, seharusnya ada ruang pelayanan khusus disabilitas total 90,9 % dan juga kebutuhan Kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan disabilitas sebesar 90,9%. Peringkat ketiga kebutuhan akan Perawat yang bersertifikat dan terapis khusus disabilitas sangat membantu dalam layanan kesehatan sebesar 86,4%. Hasil analisis persepsi menyatakan pada bidang ekonomi, kebutuhan terbesar adalah Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%. Peringkat kedua yaitu kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha sebesar total 84,2%. Peringkat ketiga adalah kebutuhan akan Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta dalam menjalankan usaha sebesar 78,9%. Pada bidang Pendidikan, hasil analisis persepsi menunjukkan sebesar 95,4% membutuhkan pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas. Selanjutnya pada bidang keagamaan hasil analisis persepsi menunjukkan sebesar 90,9% menyatakan perlunya kegiatan yang diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas.

3.7.3 Tuna Netra

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama yaitu fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar total 85,6%. Dan kebutuhan kedua tertinggi adalah fasilitas angkutan umum ramah disabilitas sebesar total 84,6 %. Kebutuhan ketiga yaitu jalan, taman bermain khusus disabilitas sebesar 68,3%. Pada bidang kesehatan hasil analisis persepsi Respons terhadap Kebutuhan Rumah sakit khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan persentase 92,3% responden menyatakan membutuhkan. Sedangkan peringkat kedua sebesar 84,6% responden merasa bahwa dalam pelayanan vaksinasi COVID19 saat ini telah diprioritaskan bagi penyandang disabilitas rungu. Peringkat ketiga sebesar 79% membutuhkan Perawat bersertifikat dan terapis khusus disabilitas. Selanjutnya dalam bidang ekonomi kebutuhan terbesar adalah Peringkat pertama yaitu kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha sebesar total 100%. Sedangkan peringkat kedua adalah Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 84,7%. Peringkat ketiga kebutuhan adalah kebutuhan akan Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta dalam menjalankan usaha sebesar 77%. Hasil analisis persepsi menyatakan pada bidang pendidikan, kebutuhan perlu pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas terbesar 100%. Pada bidang agam hasil analisis persepsi menyatakan kegiatan keagamaan diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas.

3.7.4 Tuna Wicara

Dari 7 deskripsi infrastruktur tingkat kebutuhan paling besar adalah urutan pertama yaitu fasilitas angkutan umum ramah disabilitas dan jalan yang ramah disabilitas sebesar total 100%. Peringkat kedua adalah fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas sebesar total 83,4%. Pada bidang kesehatan hasil analisis persepsi menyatakan responden merasa Kartu khusus disabilitas dan pendataan akurat data kesehatan disabilitas serta respons terhadap Kebutuhan Rumah sakit sebesar total 83,3%. khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan persentase responden menyatakan membutuhkan. Peringkat kedua kebutuhan adalah kebutuhan akan Perawat bersertifikat dan terapis khusus disabilitas sebesar 63,3%. Pada bidang ekonomi hasil analisis persepsi menyatakan, kebutuhan terbesar adalah Pihak perbankan memberikan keringanan dengan tidak meminta agunan ketika kaum disabilitas meminjam dana di bank sebesar 83,3%. Kebutuhan akan tenaga profesional keuangan yang

melakukan pendampingan usaha, sehingga tidak terjadi gagal pengembalian modal sebesar 83,3%. Peringkat ketiga yaitu kebutuhan akan peran pemerintah terhadap permodalan usaha sebesar total 84,2%. Peringkat ketiga kebutuhan adalah kebutuhan akan Pelatihan perencanaan bisnis dari pemerintah dan swasta dalam menjalankan usaha sebesar 66,7 %. Hasil analisis persepsi menyatakan pada bidang pendidikan, kebutuhan perlu pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas terbesar 66,6 %. Pada bidang agama hasil analisis persepsi Sebagian besar menyatakan Kegiatan keagamaan diperkuat oleh penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas.

Tingkat persepsi masyarakat berdasarkan kecamatan, yang sangat baik adalah di kecamatan binawidya dan marpoyan damai

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas sudah ada namun belum maksimal. Hampir semua jenis disabilitas berharap adanya perhatian khusus pemerintah terhadap penyandang disabilitas terkait kebijakan dan fasilitas yang lebih baik dan lengkap dimasa yang akan datang. Kemudian kebutuhan tertinggi bidang Infrastruktur adalah fasilitas angkutan umum ramah disabilitas total 93%. responden dari segala jenis penyandang disabilitas sangat berharap/memerlukan adanya fasilitas pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kebutuhan tertinggi bidang Kesehatan adalah Kebutuhan Rumah sakit khusus disabilitas di Kota Pekanbaru sangat diperlukan saat ini dengan persentase 95,4%, Kebutuhan tertinggi bidang Ekonomi adalah kebutuhan terbesar adalah Permodalan usaha sangat membantu ekonomi keluarga disabilitas yaitu respons terbesar 94,70%, Kebutuhan tertinggi bidang Pendidikan adalah kebutuhan perlu pengetahuan khusus tentang bagaimana menangani anggota keluarganya yang disabilitas terbesar 84,3%, Kebutuhan tertinggi bidang agama adalah kebutuhan penceramah dan pendakwah yang ramah disabilitas sebesar 78,9%

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M., D. Mont, and Irwanto. (2014). *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, Jakarta, Indonesia, Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia in collaboration with Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta, Indonesia.
- Buckingham, J. (2011). Writing histories of disability in India: strategies of inclusion, *Disability & Society*, 26 (4), 419-431. doi:10.1080/09687599.2011.567792
- Byrne, J. (2002). Life is challenging for people with disabilities in Indonesia. *Inside Indonesia*. Diakses pada 15 Februari 2010, dari <http://www.insideindonesia.org/content/view/303/29,2002>
- Couser, G.T. (2009). Three paradigms of disability. Diakses pada 14 Mei 2014 dari https://www.academia.edu/2306082/Three_paradigms_of_disability
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008) Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Dini Widinarsih. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2.

- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The SMERU Research Institute.
- Heap, M., Lorenzo, T. & Thomas, J. (2009). 'We've moved away from disability as a health issue, it's a human rights issue': reflecting on 10 years of the right to equality in South Africa. *Disability & Society*, 24(7), 857-869. doi: 10.1080/09687590903283464.
- Hidayatullah.(2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas . *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (PKS)* Vol 17 No 2.
- International Federation of Social Work (IFSW) (2000). Definition of social work: IFSW general meeting, 25-27 July Montreal, Quebec, Canada. Diakses dari : <http://www.ifsw.org/p3800138.html>
- Kasim, E.R. (2010). Resume hasil diskusi pakar terminologi Penyandang Cacat, Jakarta: Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia, 19-20 Maret Diakses dari <https://ppdi.or.id/kronologis-perlunya-terminologi-baru-sebagai-pengganti-istilah-penyandang-cacat.html>
- Katsui, H. (2008). Negotiating the human rights- based approach and the charity-based approach in development cooperation activities: Experiences of deaf women in Uganda.
- Katsui, H., & Koistinen, M. (2008). The participatory research approach in non- western countries : practical experiences from Central Asia and Zambia. *Disability & Society*, 23(7), 747-757. doi: 10.1080/09687590802469248.
- Katsui, H. & Kumpuvuori, J. (2008). Human rights based approach to disability in development in Uganda: A way to fill the gap between political and social spaces?. *Scandinavian Journal of disability research*, 10 (4), 227-236. doi: 10.1080/15017410802410084
- Krogh, T.V. (2010). From a medical to a human rights. A Case Study of Efforts to Change the Portrayal of Persons with Disabilities on Swedish Television. *The International Communication Gazette*, 72(4-5),139-162 379-394. doi:10.1177/1748048510362620
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. 3 (2,
- Marwandianto. (2018). Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM (Public Transportation Services Easily Accessed by People with Disability in Human Rights Perspective) *Jurnal HAM* Volume 9, Nomor 2.
- Mutia rahmi et. al. (2018). Pelaksanaan Asuransi Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol 1, Nomor 3.
- Naami, A. & Hayashi, R. (2012). Perception about disability among Ghanaian university students. *Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation*. 11. 100-111.doi: 10.1080/1536710X.2012. 677616.
- Naemiratch, B. & Manderson, L. (2009). Pity and pragmatism: understandings of disability in northeast Thailand. *Disability & Society*, 24(4), 475-488, doi: 10.1080/09687590902879106

- Ollerton, J. & Horsfall, D. (2013). Rights to research: utilising the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as an inclusive participatory action research tool. *Disability & Society*, 28(5), 616-630. doi: 10.1080/09687599.2012.717881
- Pribe, J., & F. Howel, F (2014). A Guide to disability rights laws in Indonesia. TNP2K Working Paper 13-2014. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Rothman, J. C. (2003). *Social work practice across disability*. Boston: Allyn and Bacon.
- Schwartz, D., Blue, E., McDonald, M., Giuliani, G., Weber, F., Seirup, H. Rose, S., Elkis-Albuhoff, D., Rosenfeld, J., & Perkins, A. (2010). Dispelling stereo-types: promoting disability equality through film. *Disability & Society*. 25 (7), 841 – 848. doi:10.1080/09687599.2010.520898
- Shapiro, A. H. (2000). *Everybody belongs: changing negative attitudes toward classmates with disabilities*. New York: Routledge Falmer.
- Stoll, S.K. (2011). Social justice: An historical and philosophical perspective. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*. 82 (8), 36-39. doi:10.1080/07303084.2011.10598675
- Suharto, S. (2011). *Difability and community- based empowerment. Lessons from the translation of the Right to work of People with impairments in Indonesia*. Saarbrucken, Germany: VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co.KG.
- Suharto, S., P..Kuiper, & P. Dorset. (2016). Disability terminology and the emergence of ‘difability’ in Indonesia. *Disability & Society*. 31 (5), 693-712. doi: 10.1080/09687599.2016.1200014
- Tamba Jefri. (2016). *Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya*. IJDS Vol. 3: No. 1.
- Tarsidi, D. (2009). *Penyandang ketunaan: Istilah pengganti ‘penyandang cacat’*. Diakses pada 6 April 2015
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
- Widinarsih, D. (2012). *Disability awareness in higher education: An experience from University of Indonesia*. the “35th Annual AHEAD Conference New Orleans, Louisiana – USA, July 12, 2012.